



Judul : UU PDP Sudah Disahkan: Kebocoran Data Masih Saja Terjadi
Tanggal : Senin, 06 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

UU PDP Sudah Disahkan Kebocoran Data Masih Saja Terjadi

ANGGOTA Komisi I DPR Junico Siahaan mengingatkan implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan harus dijalankan dengan baik. Jika tidak, maka akan menjadi bumerang untuk para pengumpul data. Oleh karena itu, sosialisasi UU PDP harus dimasifkan, terutama oleh pemerintah daerah setempat.

“Kita perlu melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya. Tadi kita sudah sampaikan dan rupanya sosialisasi sudah berjalan cukup baik. Jadi, banyak hal-hal yang (sudah) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk melindungi terutama dari segi pemerintahan,” ungkap Junico usai menghadiri pertemuan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kebo-

coran Data Komisi I DPR di Bali, Jumat (3/3).

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) itu mengatakan, dengan adanya UU PDP ini, masyarakat sebagai pemilik data sangat terlindungi karena pengelolaan data harus dengan konsen pemilik. Tindak lanjut dari praktik UU PDP ini adalah dengan dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi.

“Badan ini ada di luar dan bukan di bawah Kementerian Kominfo, harus berdiri sendiri dengan mendapatkan anggaran sendiri dari pemerintah. Jadi, independen. Karena utamanya adalah supaya bisa mengawasi. Itu yang kami minta, jangan sampai dia (badan itu) jadi wasit juga, jadi pemain juga,” tegasnya.

Diketahui, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara tegas menyatakan bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia. Ini merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi untuk dijamin keamanan atas data pribadi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto menambahkan, kunjungan ini dalam rangka untuk mengetahui langkah strategis daerah dalam melindungi dan mengelola data pribadi di era siber.

Apalagi, DPR telah mengesahkan UU PDP di akhir tahun lalu.

“Namun, fakta di lapangan menunjukkan data bocor masih ada. Antara undang-undang dan lapangannya ini kan perlu dijaga (sinkronisasinya). Oleh

karena itu kami meminta masukan. Dari situ nanti kita buat sistem untuk menjaga ini,” ungkap politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) itu.

Dia mengatakan, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang maju. Meski begitu, kebocoran data dapat terjadi pada siapa pun termasuk lembaga pemerintah dengan sistem keamanan canggih.

“Kita tahu kebocoran data hampir menimpa semua, mulai dari lembaga bahkan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Bentengnya saja pernah ‘bocor’ apalagi kita. Nah, selain nanti kita buat sistem, namun juga membuat imbauan. Membuat sosialisasi secara masif supaya orang nggak gampang dibodohi,” tegas Utut.

Menurutnya, tata kelola data pemerintah saat ini diatur melalui Perpres Satu Data Indonesia (SDI) sebagai wujud pemerintahan yang terbuka (*open government*). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis data. Namun, jika tata kelolanya tidak memiliki aspek keamanan maka *open government* dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan bangsa.

“Keterbukaan dalam sistem pemerintahan memang sebuah niscaya, tetapi juga bisa menjadi sebuah bencana jika keamanannya tidak dijaga. Ini yang nanti akan kita perkuat bersama dengan BSSN (Badan Siber Sandi Negara) dan Kominfo, kita cari jalan keluar bagaimana mengatasi ini,” tutupnya. ■ KAL